



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



DIREKTORAT JENDERAL
PERIMBANGAN KEUANGAN

KEBIJAKAN INSENTIF FISKAL 2023

Bahan Sosialisasi Insentif Fiskal Atas Kinerja
Pengendalian Inflasi Periode ke-1

Jakarta, 2 Agustus 2023

Pengalokasian Insentif Fiskal TA 2023



Pagu Alokasi Insentif Fiskal Rp8,0 T

Ditetapkan dengan Perpres Rincian APBN TA 2023

Rp4,0 T

Tata cara pengalokasian diatur dalam PMK 208 tahun 2022

Rp3,0 T

Penilaian Kinerja tahun sebelumnya untuk Daerah Berkinerja Baik

Rincian per daerah ditetapkan dalam Perpres 130 tahun 2022

Rp1,0 T

Penilaian Kinerja tahun sebelumnya untuk Daerah Tertinggal yang Berkinerja Baik

Rincian per daerah ditetapkan dalam PMK 208 tahun 2022



Rp4,0 T

Diatur dalam PMK 67 tahun 2023

Dialokasikan pada Tahun Anggaran Berjalan,

Dialokasikan dengan menggunakan kriteria dan kategori tertentu yang memperhatikan kinerja pada wilayah dan/atau sektor strategis tertentu

Rincian per daerah ditetapkan dalam KMK Alokasi

Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan



(Berdasarkan PMK 67 Tahun 2023)



(*): telah ditetapkan melalui KMK nomor 271 tahun 2023

Indikator Penilaian Kinerja Inflasi



Peringkat
Inflasi



Peringkat daerah berdasarkan Indeks Perkembangan Harga untuk kab/kota dan Inflasi gabungan untuk provinsi

**Kemendag
BPS**



Dukungan Belanja
Penanganan
Inflasi



Realisasi belanja penandaan inflasi dibanding total belanja APBD

Kemenkeu



Laporan
Pengendalian
Inflasi



Kepatuhan penyampaian laporan harian pengendalian inflasi

Kemendagri

Khusus
Kab/Kota



Upaya
Pengendalian
Inflasi



Pelaksanaan 9 upaya pengendalian inflasi versi Kemendagri

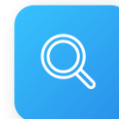
Kemendagri

Mekanisme Pengalokasian Kinerja Pengendalian Inflasi Periode I

- Berdasarkan data kinerja Triwulan I 2023 -



Rapor Penilaian Insentif Fiskal dapat diakses pada tautan



<https://djpk.kemenkeu.go.id/datadasar/>

Penyaluran & Pelaporan



IF Kinerja Pengendalian Inflasi Periode I

Tahap I
50%

Paling Cepat : Juni 2023
Tanpa syarat salur

Saat ini dalam proses perubahan DIPA per daerah

Tahap II
50%

Persyaratan:

- Rencana Penggunaan IF Kinerja Inflasi TA 2023; dan
- Laporan Realisasi Penyerapan dana Tahap I dengan serapan minimal 30%.

Syarat salur disampaikan max. 20 November 2023

IF Kinerja Pengendalian Inflasi Periode II

Tahap I
50%

Paling Cepat : Juli 2023
Tanpa syarat salur

Tahap II
50%

Persyaratan:

- Rencana Penggunaan IF Kinerja Inflasi TA 2023; dan
- Laporan Realisasi Penyerapan dana Tahap I dengan serapan minimal 30%.

Syarat salur disampaikan max. 20 November 2023

IF Kinerja Pengendalian Inflasi Periode III

100%

Disalurkan secara sekaligus

Paling Cepat : Oktober 2023

Laporan :

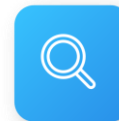
- Rencana Penggunaan Periode III; dan
- Laporan Realisasi Penyerapan dana Periode I, II, dan III

disampaikan max. Juni 2024



Dalam hal pemda penerima alokasi periode III tidak menyampaikan laporan rencana dan realisasi penyerapan, maka **dapat dikenakan penundaan penyaluran DAU dan/atau DBH.**

Aplikasi pelaporan rencana anggaran dan realisasi Insentif Fiskal



<http://sikd.djpk.kemenkeu.go.id/did/>

Penggunaan IF Kinerja Tahun Berjalan

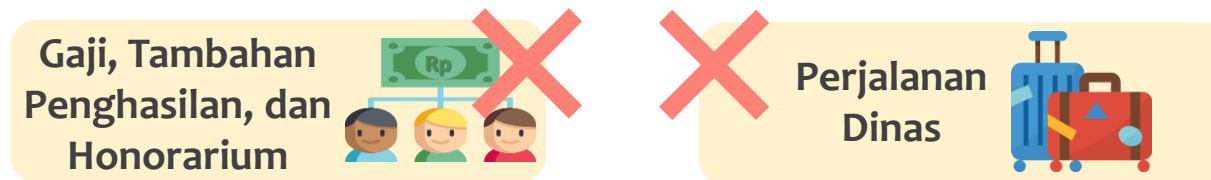


“ Insentif Fiskal digunakan untuk mendanai kegiatan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang manfaatnya diterima dan/atau dirasakan langsung oleh masyarakat, ”

dan mendukung:



Tidak Dapat Untuk Mendanai:



TERIMA KASIH



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



DIREKTORAT JENDERAL
PERIMBANGAN KEUANGAN

www.djpk.kemenkeu.go.id



PENINGKATAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH DALAM 9 UPAYA PENGENDALIAN INFLASI DI DAERAH

**Oleh:
INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

Jakarta, 9 Agustus 2023



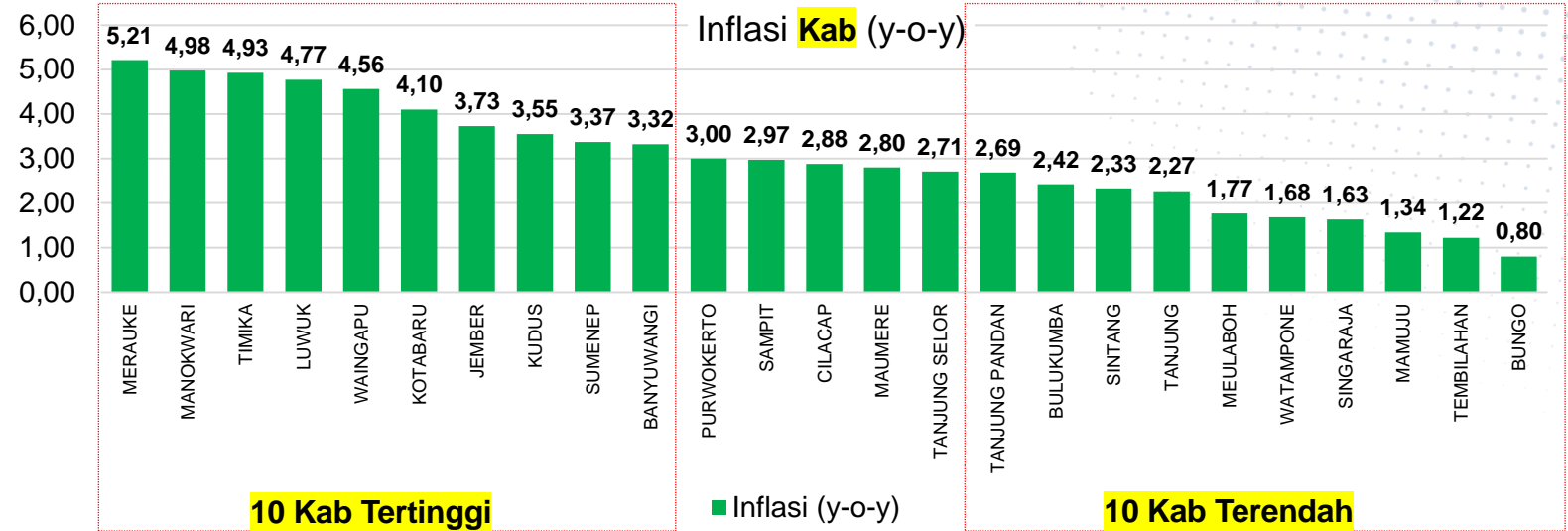
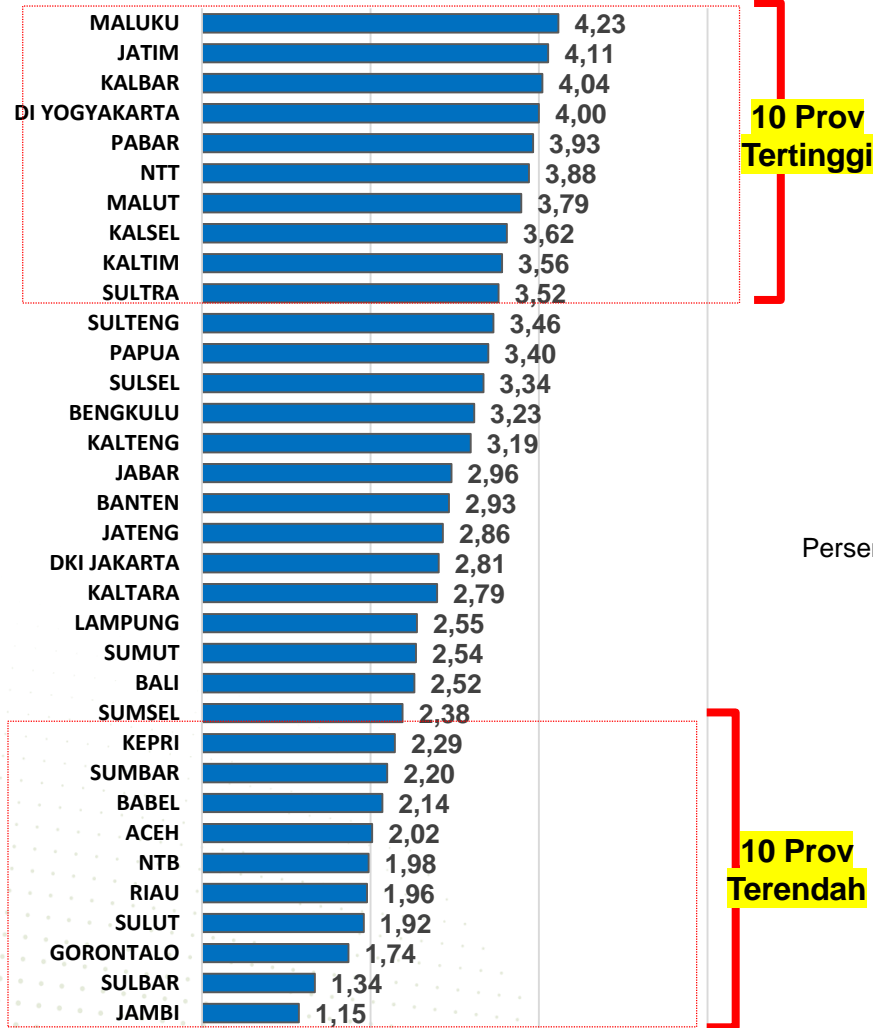
KONDISI INFLASI PROVINSI DAN KAB/KOTA



BULAN JULI 2023

Persen (%)

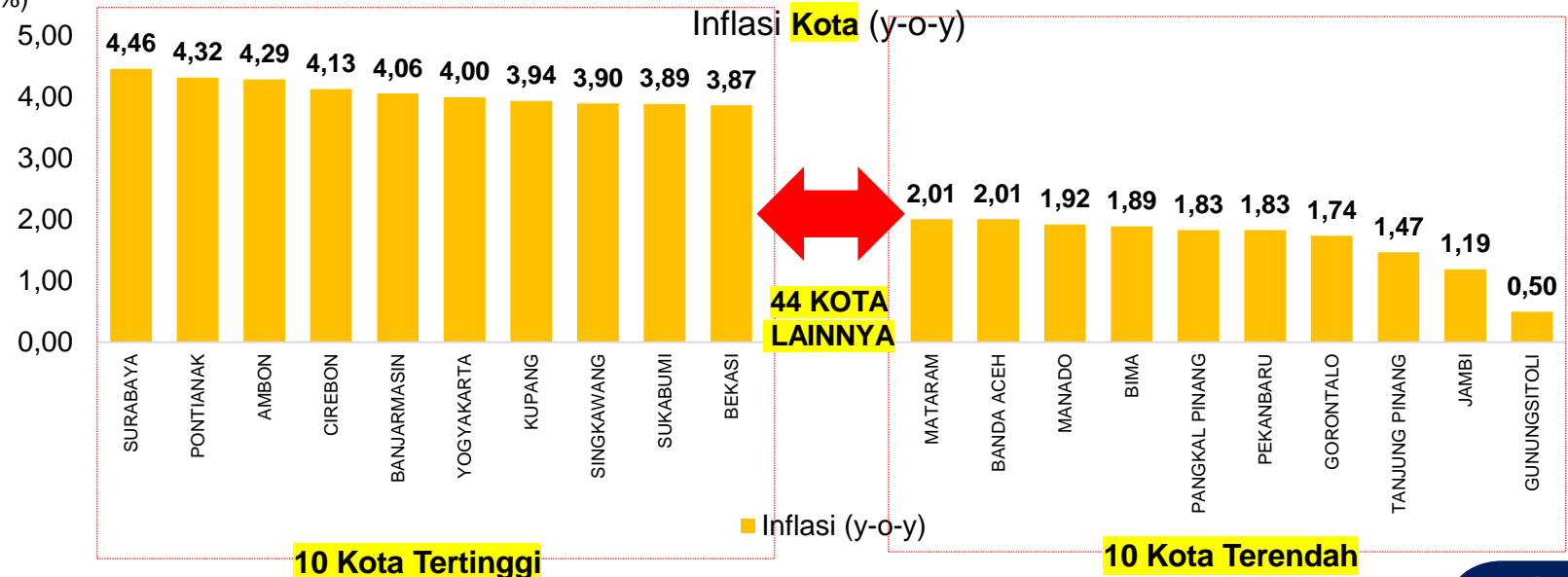
Inflasi Gabungan Kota Per-Provinsi (y-o-y)



*) Catatan

Inflasi Kab/Kota merupakan sampel 90 IHK BPS

Persen (%)



*Data belum termasuk 4 (empat) DOB di Papua





ANEV MINGGUAN PENGENDALIAN INFLASI DAERAH OLEH KEMENDAGRI



OKTOBER 2022						
Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu
25	26	27	28	29	30	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31	1	2	3	4	5

FEBRUARI 2023						
Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu
29	30	31	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	1	2	3	4

NOVEMBER 2022						
Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu
30	31	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	1	2	3

MARET 2023						
Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu
26	27	28	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	1

DESEMBER 2022						
Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu
27	28	29	30	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

APRIL 2023						
Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	1	2	3	4	5	6

JANUARI 2023						
Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	1	2	3	4

MEI 2023						
Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu
30	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3



Kementerian Dalam Negeri secara mingguan mengadakan Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Di Daerah

42

Kali

Rakor sejak

24 Oktober 2022

Narasumber Rakor dari Instansi Pusat:



KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

Kementerian Perdagangan



Kementerian Pertanian



TNI



Polri



Kejaksaan Agung RI



Badan Pusat Statistik

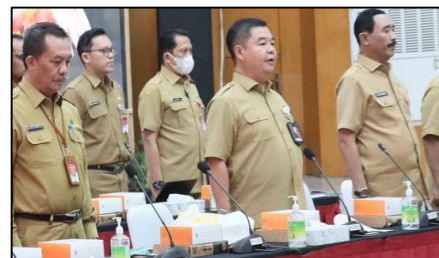


Badan Pangan Nasional

* Narasumber lainnya sesuai dengan tematik

Peserta Rakor Inflasi

Seluruh Provinsi dan Kab/Kota, serta Forkopimda tingkat Provinsi dan Kab/Kota





KEPATUHAN PENYAMPAIAN LAPORAN MINGGU I AGUSTUS 2023

51 PEMDA

Tidak menyampaikan laporan harian sepanjang Minggu ke I Agustus 2023

No	Pemda
1	Kota Banjar
2	Kabupaten Jembrana
3	Kabupaten Tabanan
4	Kabupaten Kayong Utara
5	Kabupaten Kubu Raya
6	Kabupaten Sekadau
7	Kabupaten Asmat
8	Kabupaten Biak Numfor
9	Kabupaten Boven Digoel
10	Kabupaten Deiyai
11	Kabupaten Dogiyai
12	Kabupaten Intan Jaya
13	Kabupaten Keerom
14	Kabupaten Lanny Jaya
15	Kabupaten Mamberamo Raya
16	Kabupaten Mamberamo Tengah
17	Kabupaten Merauke

No	Pemda
18	Kabupaten Nabire
19	Kabupaten Paniai
20	Kabupaten Pegunungan Bintang
21	Kabupaten Puncak
22	Kabupaten Puncak Jaya
23	Kabupaten Tolikara
24	Kabupaten Waropen
25	Kabupaten Yahukimo
26	Kabupaten Yalimo
27	Kabupaten Tanjung Jabung Barat
28	Kabupaten Belu
29	Kabupaten Malaka
30	Kabupaten Manggarai Timur
31	Kabupaten Rote Ndao
32	Kabupaten Sikka
33	Kabupaten Sumba Barat
34	Kabupaten Sumba Barat Daya

No	Pemda
35	Kabupaten Timor Tengah Selatan
36	Kabupaten Timor Tengah Utara
37	Kabupaten Banggai Kepulauan
38	Kabupaten Donggala
39	Kabupaten Morowali Utara
40	Kabupaten Fakfak
41	Kabupaten Pegunungan Arfak
42	Kabupaten Raja Ampat
43	Kabupaten Sorong Selatan
44	Kabupaten Teluk Bintuni
45	Kabupaten Bima
46	Kabupaten Jeneponto
47	Kota Palopo
48	Kabupaten Muara Enim
49	Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
50	Kabupaten Lebong
51	Kabupaten Pulang Pisau





SIMPULAN HASIL MONEV TIM APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP)

UPAYA YANG DILAKUKAN DAN DILAPORKAN PEMDA DALAM TAHUN 2023

No	Kegiatan	JUMLAH PEMDA	
		31 Juli 2023	5 Agustus 2023
1	Pemantauan harga dan stok untuk memastikan kebutuhan tersedia	454	455
2	Rapat teknis Tim Pengendali Inflasi Daerah	422	423
3	Menjaga pasokan bahan pokok dan barang penting	329	331
4	Pencanangan gerakan menanam	332	333
5	Melaksanakan operasi pasar murah bersama dinas terkait	440	441
6	Melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang	419	421
7	Berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan	241	241
8	Merealisasikan BTT untuk dukungan pengendalian Inflasi	16	18
9	Memberikan bantuan transportasi dari APBD	206	209



6 (ENAM) UPAYA KONKRIT PEMDA DALAM PENANGANAN INFLASI DAERAH

Dari 9 upaya tersebut, terdapat 6 upaya yang sifatnya konkrit dilakukan Pemda

1



Melaksanakan operasi pasar murah

2



Melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang

3



Kerja Sama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan

4



Gerakan Menaman

5



Merealisasikan BTT

6

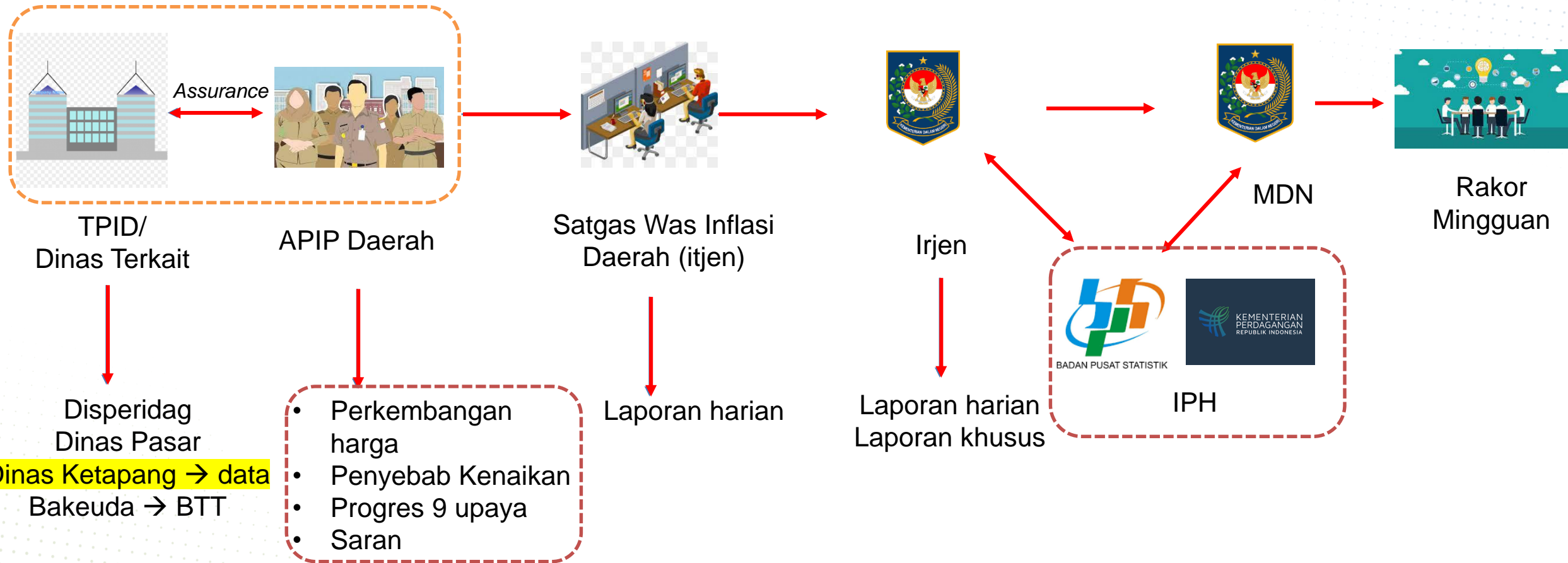


Dukungan Transportasi dari APBD

No	Upaya Konkrit Pemerintah Daerah	Jumlah Pemda	
		31 Juli 2023	5 Agustus 2023
1	Telah melakukan ke 6 (enam) upaya konkrit dalam penanganan inflasi	13	14
2	Telah melakukan 4 (empat) s.d 5 (lima) dari 6 (enam) upaya konkrit dalam penanganan inflasi	240	240
3	Belum melakukan upaya konkrit dalam penanganan inflasi, karena hanya melakukan 1 (satu) s.d 3 (tiga) upaya dalam penanganan inflasi	216	217
4	Belum melakukan sama sekali upaya konkrit dalam penanganan inflasi	45	43



OPERASIONALISASI KERJA SATGAS PENGAWASAN PENGENDALIAN INFLASI DAERAH SECARA HARIAN





KONSEPSI INDEKS KINERJA PENGENDALIAN INFLASI PANGAN DAERAH (IKPIPD)

1. Tetap menggunakan IHK (inflasi) karena merupakan official statistics sebagai bagian dari penyusunan Indikator Kinerja Pengendalian Inflasi
2. IPH sebagai leading indikator untuk IHK memiliki keterbatasan:
 - a. Penghitungannya hanya mencakup 20 komoditas pangan, dan bobot komoditasnya menggunakan pendekatan sister city yang memiliki bias pengukuran.
 - b. Baru ada sejak M1 bulan Oktober 2022.
3. Ketersediaan Data Dari 514 Pemerintah Kabupaten/Kota :
 - a. 90 wilayah kota (perkotaan) yang menjadi wilayah pengukuran IHK → dilakukan normalisasi
 - b. 380 menjadi wilayah pengukuran IPH
 - c. 44 pemerintah daerah yang belum tersedia



1. Mempertimbangkan IPH (perubahan IPH) sebagai solusi untuk mengisi kekosongan indikator kinerja inflasi daerah di Kab/Kota yang bukan kota IHK
2. Perbedaan cara dan metode pengukuran IHK vs IPH perlu di Normalisasi agar kedua ukuran tersebut “dapat terbanding”





Kerangka Konseptual: Indikator Kinerja Pengendalian Inflasi Pangan Daerah

Tujuan dari
penyusunan Indeks

1. Mendapatkan sebuah ukuran dari upaya pengendalian inflasi daerah yang berupa pencapaian kinerja.
2. Ukuran ini akan digunakan sebagai salah satu *variable* dalam formula pengalokasian DID

Fenomena yang
ingin diukur

1. Sembilan upaya yang telah dilakukan dalam pengendalian inflasi daerah
2. Tingkat Kepatuhan pelaporan harian pengendalian inflasi daerah
3. Capaian hasil dari upaya pengendalian inflasi

Mengidentifikasi dimensi,
aspek, indikator yang akan
digunakan agar fenomena
dapat terukur

1. Langkah Konkret [40%]
2. Pelaporan [10%]
3. Capaian Inflasi [50%]

Penetapan Bobot dengan metode:

1. Arbiter
2. Statistik
3. **Expert Judgement**





IKPIPD

“FORMULA”

$$\text{Nilai} = (\text{Jumlah Pelaporan} \times 10\%) + (\text{Jumlah Langkah Konkret} \times 40\%) + (\text{Ranking Inflasi} \times 50\%)$$

Keterangan:

1. Jumlah Pelaporan = jumlah laporan harian selama periode perhitungan yg disampaikan kpd Kemendagri
2. Jumlah langkah konkret = upaya dilakukan pemda selama periode perhitungan (skala 0-9)
3. Ranking inflasi = IHK dan IPH yang telah dinormalisasi thd data pangan SP2KP Kemendagri diolah oleh BPS

Terhadap hasil penyusunan IKPIPD didapatkan rentang persepsi:

- 1) $IKPIPD < 50$ = sangat buruk
- 2) $50 \leq IKPIPD < 65$ = buruk
- 3) $65 \leq IKPIPD < 75$ = sesuai
- 4) $75 \leq IKPIPD < 86$ = memuaskan
- 5) $IKPIPD \geq 86$ = sangat memuaskan





DIMENSI	BOBOT	SUB DIMENSI	BOBOT	KETERANGAN
Jumlah pelaporan	10%	Kepatuhan Laporan harian ke Itjen Dagri	4%	Realisasi laporan/hari kerja
Upaya Konkrit	40%	pemantauan harga dan stok untuk memastikan kebutuhan tersedia	20%	Ya/Tidak
		rapat teknis Tim Pengendali Inflasi Daerah		Ya/Tidak
		menjaga pasokan bahan pokok dan barang penting.		Ya/Tidak
		pencanangan gerakan menanam	80%	Ya/Tidak
		melaksanakan operasi pasar murah bersama dinas terkait;		Ya/Tidak
		melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang		Ya/Tidak
		berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan		Ya/Tidak
		merealisasikan Belanja Tidak Terduga untuk dukungan pengendalian inflasi;		Ya/Tidak
memberikan bantuan transportasi dari APBD	Ya/Tidak			



DIMENSI	BOBOT	SUB DIMENSI	BOBOT	KETERANGAN
Jumlah pelaporan	10%	Kepatuhan Laporan harian ke Itjen Dagri	4%	Realisasi laporan/50
		Kinerja Laporan SP2KP	3%	Realisasi laporan/50
		Kepatuhan laporan ke TPIP	3%	Kepatuhan laporan Tri II
Upaya Konkrit	40%	Pemantauan harga dan stok untuk memastikan kebutuhan tersedia	20%	50 = 30 – 49 = < 30 =
		Rapat teknis Tim Pengendali Inflasi Daerah		Rakor mingguan = 12 x HLM = 1 x
		Menjaga pasokan bahan pokok dan barang penting.		0 ; 1 x; 2 x; 3 x
		Pencanangan gerakan menanam	80%	Ya/Tidak
		Melaksanakan operasi pasar murah bersama dinas terkait;		Ya/Tidak
		melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang		0 ; 1 x; 2 x; 3 x
		berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan		KAD yg masih berlaku s.d Tri II
		merealisasikan Belanja Tidak Terduga untuk dukungan pengendalian inflasi;		Ada realisasi anggaran di Triwulan II
		memberikan bantuan transportasi dari APBD		Ada realisasi anggaran di Triwulan II





KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Republik Indonesia



TERIMA KASIH

 www.kemendagri.go.id  [Kemendagri_RI](#)  [kemendagri](#)  [kemendagri](#)

